

HUMAS

Lapsustik Purwokerto Ikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi Bagi WBP

Narsono Son - BANYUMAS.HUMAS.CO.ID

Sep 5, 2022 - 22:24

PENYEMPURNAAN SISTEM DATA BASE PEMASYARAKATA (SDP)

Bahwa proses penyempurnaan Sistem Data Pemasarakatan (SDP) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Surat Edaran Dirjen Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-20.OT.02 Tahun 2022 membutuhkan kurang lebih 1 (satu) Bulan.

Atas Perintah Pimpinan Penyempurnaan Sistem Data Pemasarakatan (SDP) dapat terselesaikan 1 (satu) Minggu.

UPT dapat melakukan update Patch SDP dengan mengupload file perbaikan Patch SDP rilis 20220902 13.31 WIB melalui http://sdp.ditjenpas.go.id/patch_sdp/patchSDP.php

Agar UPT dapat memedomani Surat Nomor PAS.3-UM.0413 Tentang Pemberitahuan Penyempurnaan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

SDP

Lapsustik Purwokerto Ikuti Sosialisasi Pengusulan Hak Integrasi Bagi WBP

BANYUMAS - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan telah resmi disahkan dan diundangkan. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mengenai hak-hak yang berhak diterima oleh narapidana.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan sosialisasi mengenai pengusulan hak integrasi sesuai dengan UU no.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan secara daring melalui aplikasi zoom meeting (Senin, 05/09/2022).



Dalam kesempatan ini Bapak Thurman Saud Marojahan Hutapea selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi beserta Bapak Pujo Harinto selaku Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak memberikan pemaparan materi mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengusulan hak integrasi kepada seluruh WBP.

Dhimas Isdwiyono, selaku Kasi Binadik dan Giatja memberikan sedikit pesan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah supaya kita mengetahui syarat dan pelaksanaan pemberian hak-hak integrasi kepada seluruh WBP, sehingga WBP dapat menerima hak mereka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam akhir acara ada sedikit kesimpulan yang disampaikan.

"Semua WBP harus mendapatkan hak bersyarat sesuai dengan ketentuan yang ada dan kepala UPT harus mengawasi proses pengusulan tersebut sehingga semua terkontrol dan berjalan sesuai rencana", Ujar Thurman di akhir sesi.

(N.Son/***)